BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya alam hingga saat ini masih menjadi modal dasar pertumbuhan ekonomi yang sangat penting. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan berdampak pada perekonomian itu sendiri. Salah satu konteks pengelolaan sumber daya hutan, kebun dan lahan yang perlu diperhatikan adalah pola pikir jangka pendek, cepat dan murah, yaitu pada saat penyiapan areal untuk budidaya dengan cara membakar.

Penyiapan areal melalui pembakaran telah berlangsung lama dan menjadi salah satu kearifan masyarakat lokal. Namun, ketika jumlah penduduk yang semakin banyak, kondisi lahan yang rusak, ataupun kondisi iklim saat terjadi El-Nino, pembakaran yang dilakukan pada periode yang sama menyebabkan kejadian kebakaran hutan, kebun, dan lahan (karhutbunla) dengan intensitas yang cukup tinggi. “Hal ini terjadi pada belasan tahun terakhir dan pada tahun 2015, karhutbunla berlangsung secara masif dalam jangka waktu cukup lama dan luasan yang besar. Akibatnya, kerugian besar diderita oleh masyarakat baik dalam aspek lingkungan dan sosial maupun ekonomi”.¹

Kebakaran hutan akhir-akhir ini sering terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera, Kalimantan, termasuk Kalimantan Selatan. Mengingat pentingnya akan sumberdaya hutan dalam ikut menambah devisa negara, agar tidak terjadi

¹Grand Design, *Pencegahan Kebakaran Hutan, Kebun, Dan Lahan 2017-2019*, hlm. xii.

penurunan, maka upaya perlindungan hutan dari gangguan luar terutama dari kebakaran hutan perlu diusahakan semaksimal mungkin.

Dalam membuka lahan pertanian, petani-petani menggunakan cara membakar hutan sebagai lahan pertanian. Di sisi lain tidak hanya petani kecil saja yang menggunakan cara tersebut tetapi perusahaan atau korporasi juga menggunakan cara tersebut untuk membuka lahan. Fenomena ini mengakibatkan pencemaran udara yang sangat luas bahkan melampaui batas wilayah dari areal pembakaran tersebut. Hingga saat ini masih sering terjadi pembakaran hutan secara liar guna untuk melakukan pembukaan lahan tanpa adanya efek jera dari perbuatan tersebut.

Kebakaran hutan dan lahan merupakan penyimpangan terhadap hukum yang berlaku dan adanya unsur sengaja maupun tidak sengaja bagi pemegang izin Hak Penguasaan Hutan (HPH) atau pemegang eksploitasi lainnya. “Sehingga, penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan menjadi tugas dan tanggung jawab negara, khususnya dalam penegakan hukum yang menjamin kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum”.²

Pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan

²Elita Rahmi, “**Penegakan Hukum Dan Fatwa Haram MUI Terhadap Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Indonesia**”, Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 16, No. 1, Juni 2016, Fakultas Hukum Universitas Jambi, hlm. 59.

dan berkelanjutan. Dipertegas lagi pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. “Demikian pula halnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat”.³

Pengaturan tentang korporasi yang melakukan pembakaran hutan dalam undang-undang lingkungan hidup dapat dilihat pada undang undang lainnya yaitu “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan”.⁴ Undang-undang ini bisa menjerat korporasi sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana sehingga korporasi tidak bisa lepas dari tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

“Fakta hukum berupa kerusakan lingkungan (*enviromental damages*) akibat pembangunan adalah realitas meningkatkan kebutuhan manusia dalam menaklukan alam dengan segenap isinya penggunaan kekuatan militer/perang”,⁵ kegiatan korporasi transnasional, perubahan iklim, pencemaran laut secara massif dan kegiatan resiko tinggi menjadi bagian dari aktivitas manusia baik dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja akibat tekanan, tuntutan maupun keadaan semata.

³*Ibid.*

⁴Sunarwan, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Pembakaran Hutan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan”, Skripsi Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 8.

⁵Elita Rahmi, “Pembentukan Peradilan Khusus Lingkungan Dalam Rangka Pengembangan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2017, hlm. 332.

Pengaturan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam hal ini yaitu mengenai pengendalian pencemaran udara yang telah diatur dalam sejumlah perangkat hukum, yaitu “PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan PP Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan”.⁶

Pengendalian pencemaran udara berdasarkan PP Nomor 41 tahun 1999 dilakukan melalui tiga upaya, yaitu pencegahan, penanggulangan dan pemulihan mutu udara. Upaya penanggulangan dan pemulihan dilakukan melalui langkah-langkah berikut: mewajibkan kegiatan sumber pencemar melakukan penanggulangan dan pemulihan, menetapkan pedoman teknis penanggulangan dan pemulihan, melakukan pengawasan penataan oleh sumber pencemar membayar ganti rugi kepada penderita.⁷

Pemerintah merasa perlu untuk mengundang sebuah perangkat hukum yang khusus untuk pengendalian pencemaran udara yang bersumber dari kebakaran hutan dan lahan karena kegiatan pengalihan fungsi lahan dan kawasan hutan menjadi kawasan perkebunan dan pertanian melalui pembakaran telah menjadi gejala yang lazim dalam beberapa tahun terakhir ini. Kegiatan pembakaran lahan dan kawasan hutan telah menimbulkan pencemaran udara atau kabut asap di sejumlah wilayah Indonesia dan bahkan kabut asap itu telah mencapai wilayah negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Perangkat hukum yang dimaksud adalah PP Nomor 41 Tahun 1999.

⁶Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 143.
⁷*Ibid.*, hlm. 145-146.

PP Nomor 4 tahun 2001 memuat ketentuan larangan, ketentuan kewajiban atau perintah dan ketentuan tentang hak. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan dalam PP Nomor 4 Tahun 1999 dapat dibedakan juga atas terhadap siapa norma itu diarahkan, yaitu orang, pengusaha dan instansi pemerintah. Ketentuan yang bersifat larangan terhadap setiap orang tercantum dalam Pasal 11 yaitu: “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan dan lahan”. Dari rumusan Pasal 11 itu dapat diketahui bahwa ketentuan larangan itu bersifat mutlak karena tidak ada ketentuan pengecualian. Ketentuan-ketentuan yang bersifat perintah atau mewajibkan kepada setiap orang untuk mencegah terjadinya pencemaran akibat kebakaran hutan dan lahan (Pasal 12), menanggulangi kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi kegiatannya (Pasal 17), melakukan pemulihan dampak kebakaran hutan dan lahan (Pasal 20), melaporkan dugaan telah terjadinya atau telah terjadinya kebakaran lahan dan hutan kepada pejabat daerah setempat (Pasal 39).

Ketentuan-ketentuan yang bersifat perintah atau kewajiban kepada pengusaha adalah mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan di lokasi usahanya (Pasal 13), memiliki sarana dan prasarana pencegahan pemadam kebakaran hutan dan lahan (Pasal 14 ayat (1)), melakukan pemantauan pencegahan kebakaran dan melaporkan hasil pemantauan kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota dan tembusan kepada Kementerian Lingkungan Hidup sekurang-kurangnya enam bulan sekali (Pasal 15), melakukan penanggulangan kebakaran (Pasal 18 ayat (1)), melakukan pemulihan lingkungan akibat kebakaran lahan dan hutan (Pasal 21 ayat (1)), menyampaikan

laporan tentang upaya penanggulangan kebakaran yang telah dikerjakan kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota (Pasal 41).

Ketentuan tentang hak tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) yaitu hak untuk mendapatkan informasi tentang peta daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, peta peringkat bahaya kebakaran hutan dan lahan, dokumen perizinan perusahaan hutan dan lahan, dokumen Amdal, rencana penyiapan atau pembukaan lahan atau hutan dan hasil peindraan jauh dari satelit. “Pengakuan hak ini adalah bagian dari peran serta dalam pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan yang bersumber pembakaran lahan dan hutan”.⁸

“Faktor-faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan meliputi bahan bakar, cuaca, waktu dan topografi. Faktor bahan bakar yang mempengaruhi kebakaran hutan dan lahan terdiri atas ukuran, susunan, volume, jenis, dan kandungan kadar airnya”.⁹ Kelima hal tersebut memiliki pengaruh yang saling mempengaruhi, sehingga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.

Faktor cuaca merupakan faktor penting kedua yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, meliputi: angin, suhu, curah hujan, keadaan air tanah dan kelembapan relatif.

Waktu juga dapat mempengaruhi terjadinya kebakaran hutan, karena waktu sangat terkait dengan kondisi cuaca yang menyertainya. Waktu dipisahkan atas waktu

⁸*Ibid.*, hlm. 148.

⁹Bambang Purbowaseso, *Pengendalian Kebakaran Hutan Suatu Pengantar*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 35.

siang dan malam hari. Terdapat hubungan antara waktu dengan kondisi kebakaran hutan dan lahan.

“Faktor topografi yang mempengaruhi kebakaran hutan dan lahan mencakup tiga hal yaitu kemiringan, arah lereng dan medan. Masing-masing faktor tersebut sangat mempengaruhi perilaku api kebakaran hutan dan lahan”.¹⁰

Secara umum ada beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan diantaranya adalah:

1. Faktor alam misalnya, karena suhu pada musim kemarau yang sangat panas, sambaran petir, atau karena aktifitas vulkanik dari gunung berapi (aliran lahar atau awan panas).
2. Kecerobohan manusia, contohnya adalah membuang puntung rokok sembarangan atau lupa untuk mematikan api ketika melakukan perkemahan.
3. Pembukaan lahan baru atau membersihkan lahan pertanian dengan membakarnya, dan tindakan vandalisme.
4. *Ground fire* atau kebakaran yang terjadi di dalam tanah, biasanya terjadi di dalam tanah, biasanya terdapat di daerah yang memiliki tanah gambut sehingga dapat menyulut terjadinya api terutama di musim kemarau di suhu yang panas.¹¹

Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia yang mengakibatkan beberapa lain diantaranya yaitu:

1. Emisi gas karbon ke atmosfer sehingga meningkatkan pemanasan global.
2. Hilangnya habitat bagi satwa liar sehingga terjadi ketidakseimbangan ekosistem.
3. Hilangnya pepohonan yang merupakan penghasil oksigen serta penyerap air hujan sehingga terjadi bencana banjir, longsor, dan kekeringan.
4. Hilangnya bahan baku industri yang akan berpengaruh pada perekonomian.
5. Berkurang luasan hutan yang akan berpengaruh pada iklim mikro (cuaca cenderung panas).
6. Polusi asap sehingga mengganggu aktivitas masyarakat dan menimbulkan berbagai penyakit pernafasan.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Arif Bayu Praminto, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomer 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi Kasus Putusan No.354/PID.B/2013/PN.PSP)”, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2016, hlm. 4.

7. Penurunan jumlah wisatawan.¹²

Perlindungan hutan dari kebakaran dilakukan dengan cara penetapan norma larangan melakukan pembakaran hutan tanpa izin dan norma larangan pembuangan benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran. Pembakaran dengan izin dapat diberikan untuk tujuan pembasmian hama dan penyakit, pembinaan habitat dan satwa. Selain itu perlindungan hukum dari kebakaran dilakukan melalui upaya pengendalian yang terdiri atas pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran. Kegiatan pengendalian kebakaran hutan dilihat dari segi kelembagaan dibedakan atas empat tingkatan yaitu nasional, provinsi, kabupaten/kota dan unit atau kesatuan pemangkuan hutan. “Menteri Kehutanan, Gubernur, Bupati/Walikota dan kepala satuan penetapan hutan menetapkan program pengendalian kebakaran sesuai lingkup kewenangan masing-masing yaitu nasional, provinsi, kabupaten/kota dan wilayah kesatuan pengelolaan hutan”.¹³

Sejak terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang cukup besar pada tahun 1982 dan rentetan kebakaran hutan beberapa tahun berikutnya, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka menangani langkah ini. Beberapa perundang-undangan yang dilahirkan menekankan sanksi yang berat bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

¹²*Ibid.*, hlm. 5.

¹³Takdir Rahmadi, *Op. Cit.*, hlm. 179-180.

Lingkungan Hidup, serta PP Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan yang telah direvisi dengan PP Nomor 60 Tahun 2009.

Dalam hal ini, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan adalah korporasi, maka ia bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan Pasal 1 angka (22) menjelaskan, bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Namun dalam undang-undang ini tidak menjelaskan ketentuan pidana mengenai Pasal 49, maka pertanggungjawaban korporasi dilekatkan kepada *actual conduct* atau resiko kegiatan. Dan Pasal 50 ayat (3) huruf (d), bahwa setiap orang dilarang membakar hutan. Namun dalam undang-undang ini apabila pelakunya korporasi maka digunakan Pasal 78 ayat (14). Peraturan tentang pembakaran hutan yang dilakukan perseorangan maupun korporasi tercantum juga dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU P2LH) Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 98, namun dalam undang-undang ini yang mengatur pidana apabila terdapat pembakaran hutan yang dilakukan oleh korporasi, maka pasal yang digunakan yaitu Pasal 116 sampai Pasal 119 dimana pasal ini menerangkan bahwa pembakaran hutan yang dilakukan oleh korporasi dapat di pidana sesuai dengan pasal ini. Sementara itu, dalam Undang-undang Perkebunan aturan yang mengatur tentang pembakaran hutan terdapat dalam Pasal 56 ayat (1). Sehingga sudah jelas dalam undang-undang ini melarang membuka lahan dengan cara membakar sehingga peraturan yang menerangkan pembakaran hutan dalam undang-undang ini sudah diatur. Dalam peraturan pidana tentang korporasi terdapat dalam Pasal 113 Undang-undang perkebunan. “Dengan melihat beberapa isi pasal Undang-undang Perkebunan yang mengatur tentang pembakaran lahan yang dilakukan perseorangan maupun korporasi, serta sanksi yang ada dalam Undang-undang Perkebunan diharapkan dapat mengurangi tindak pidana pembakaran lahan di bidang perkebunan”.¹⁴

Pasal 108 juncto Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dijadikan sebagai alat penegakan hukum untuk menangkap dan menghukum pembakar lahan oleh pelaku usaha perkebunan. Sehingga dalam kajiannya Undang-Undang Perkebunan ini memiliki relevansi dengan Undang-

¹⁴*Ibid.*

Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), bahwa pelaku usaha perkebunan yang dilarang membuka lahan dengan cara membakar bukanlah pekebun melainkan perusahaan perkebunan. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan merupakan penekanan kembali Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa “setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”. Relevansi kedua Pasal ini bertujuan sebagai pembuktian secara hukum, bahwa pembangunan perekonomian Indonesia memiliki wawasan lingkungan. Maksudnya yaitu negara bertanggungjawab untuk perekonomian yang lebih baik lagi bagi seluruh warganya tanpa mengurangi hak-hak warganya untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

Dalam hal kehidupan kesehariannya, aktivitas korporasi sangat memberi efek positif bagi kehidupan perekonomian suatu bangsa. “Pada sisi lainnya, aktivitas korporasi bisa memberi kontribusi negatif, dalam artian perbuatan atau akibat tertentu yang ditimbulkannya bisa termasuk dalam kategori pelanggaran hukum pidana”.¹⁵

Ratusan perusahaan atau korporasi seringkali menjadi pelaku atau setidaknya turut terlibat dalam melakukan kejahatan yang merugikan masyarakat, bangsa dan negara bahkan merugikan perekonomian dunia. “Kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan atau setidaknya melibatkan suatu korporasi ini dilakukan dalam banyak

¹⁵Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 137.

aspek misalnya saja aspek ekonomi atau bisnis, aspek sosial, aspek lingkungan hidup dan aspek-aspek strategis lainnya”.¹⁶

“Dalam hal terjadi suatu perbuatan atau akibat tertentu yang masuk dalam kelompok kebakaran hutan yang berkaitan dengan korporasi, maka sebenarnya tidak hanya korporasi dan atau negara saja yang menderita kerugian karenanya, melainkan juga masyarakat pada umumnya”.¹⁷

Korporasi sebagai subjek hukum pidana dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi tersebut. Salah satunya yaitu korporasi sebagai pelaku pembakaran hutan dan lahan, maka korporasi dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan aturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Korporasi sering pula disebut sebagai *legal entities* atau *rechtperson* dengan maksud untuk menjelaskan bahwa badan tersebut memiliki identitas hukum yang memiliki kekayaan serta hak dan kewajiban yang terpisah dari anggota-anggotanya. Secara umum terminologi korporasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

1. Merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan hukum khusus.
2. Memiliki jangka waktu hidup yang tidak terbatas.
3. Memperoleh kekuasaan dari negara untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu.
4. Dimiliki oleh pemegang saham.
5. Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya.¹⁸

¹⁶Kristian, *Kejahatan Korporasi Di Era Modern & Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 21.

¹⁷Hasbullah F. Sjawie, *Op. Cit.*, hlm. 137.

¹⁸Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 19.

Black Law Dictionary menjelaskan pengertian hukum dari korporasi (*legal definition*) adalah sebagai berikut.

Corporation: an entity (usually a business) havings authority under law to act as a single person distinct from the shareholders who own it, having rights to issue stock and exist indefinetely. A group of succession of persons, estabilished in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has a legal personality distinct from the natural persons who make it up, exist indefinetely apart from them, and has the legal powers that its constitution gives it.

Suatu organisasi (pada umumnya dalam suatu bisnis) yang mempunyai kewenangan berdasarkan hukum untuk bertindak sebagai suatu pribadi tunggal yang dibedakan dengan para pemegang saham sebagai pemilik, mempunyai hak untuk mengeluarkan saham yang keberadaannya adalah terpisah. Suatu kelompok orang yang didirikan menurut undang-undang ke dalam suatu manusia ciptaan hukum atau badan hukum yang memiliki sebuah kepribadian hukum yang berbeda dengan pribadi kodrati (manusia alamiah) yang membuatnya ada dan keberadaannya terlepas dari mereka dan memiliki kewenangan hukum berdasarkan anggaran dasar yang dibuatnya.¹⁹

Sebagaimana diketahui bahwa pada awalnya hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia belum mengatur tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana, karena KUHP sebagai hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia hanya menentukan bahwa subjek hukum pidana adalah hanya orang pribadi (alami). Hal tersebut berkaitan dengan pembentukan KUHP yang pada saat itu banyak dipengaruhi doktrin atau pandangan yang berpegang teguh pada adagium bahwa badan hukum tidak dapat dipidana (*universitas delinquere nonprotest*) dengan anggapan bahwa:

1. Korporasi tidak mempunyai *mens rea* (keinginan untuk berbuat jahat).
2. Korporasi bukan seorang pribadi meskipun korporasi dapat melakukan berbagai perbuatan hukum yang biasanya dilakukan oleh orang pribadi.
3. Korporasi tidak memiliki kesadaran dan tidak punya badan aktual (*no soul to be damned and no body to be kicked*).
4. Korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena jika ada kejahatan yang dilakukan oleh direksi suatu korporasi, hal tersebut sudah pasti merupakan perbuatan di luar anggaran dasar dari korporasi yang bersangkutan, sehingga dalam hal seperti itu maka yang bertanggung jawab adalah direksinya secara pribadi atau secara bersama-sama dengan direksi

¹⁹*Ibid.*, hlm. 20.

lain, tetapi bukan korporasi yang harus bertanggung jawab (doktrin *ultra vires*).²⁰

Namun demikian, seiring dengan meningkatnya peran korporasi dalam lalu lintas transaksi keuangan dan perdagangan di Indonesia dan diterimanya doktrin yang mengatakan korporasi dapat dimasukkan dalam *functioned daderschap*, maka berarti korporasi dapat menjadi subjek hukum pidana.

Sebagai salah satu contohnya, kasus kebakaran lahan yang melibatkan salah satu perusahaan yaitu dengan terdakwa PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) (Putusan: Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw) yang berada di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, yang bergerak di bidang Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit dan Kegiatan Pengolahan Kelapa Sawit di Pabrik Kelapa Sawit. Korporasi menjadi subjek hukum pidana dan korporasi dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Di dalam putusannya menyatakan bersalah kepada Korporasi yang diwakili oleh Pengurus sebagai orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan karena kelalaiannya mengakibatkan baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (Pasal 99 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Dan bersalah melakukan tindak pidana tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam

²⁰*Ibid.*, hlm. 21.

Pasal 68 (Pasal 109 jo. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan). Kepada pengurus dijatuhkan pidana denda sejumlah Rp. 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana untuk memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan sejumlah Rp. 38.652.262.000 (tiga puluh delapan miliar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) serta menetapkan barang bukti dan juga membebankan biaya perkara kepada terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut, maka kesalahan yang terdapat dalam diri korporasi yaitu karena adanya kekurangan alat sarana dan prasarana pendukung guna untuk mengendalikan kebakaran lahan.

S.R. Sianturi dalam buku Imam Anshori mengatakan, bahwa dalam perkembangan hukum pidana selanjutnya, bukan hanya manusia yang dianggap sebagai subjek, tetapi juga badan hukum terutama dalam hal-hal yang menyangkut:

1. Sumber keuangan negara (perpajakan, bea impor dan ekspor barang dan lain sebagainya).
2. Pengaturan perekonomian (pengendalian harga, penggunaan cek, pengaturan perusahaan dan sebagainya).
3. Pengaturan keamanan (subversi, keadaan bahaya, dan lain sebagainya).

Pada bagian lain lebih lanjut dikemukakan oleh S. R. Sianturi, bahwa: Singkatnya penentuan atau perluasan badan hukum sebagai subjek tindak pidana adalah karena suatu kebutuhan, terutama dalam soal perpajakan, perekonomian dan keamanan negara yang disesuaikan dengan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan manusia. Namun pada hakikatnya manusia yang merasakan dan menderita pidana itu.²¹

Dalam perkembangannya banyak negara kemudian melakukan pembaruan KUHP, termasuk Belanda sebagai induk hukum pidana Indonesia. Korporasi di

²¹Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Op. Cit.*, hlm. 22-23.

banyak negara dapat melakukan tindak pidana. Subyek hukum pidana tidak dapat dibatasi lagi hanya pada manusia alamiah (*natural person*), mencakup pula manusia hukum (*juridicial person*) yang lazim disebut korporasi. “Sejumlah undang-undang di Indonesia di luar KUHP sesungguhnya sudah memuat kemungkinan tindak pidana korporasi. Antara lain dalam tindak pidana ekonomi, tentang penyelesaian perburuhan, tentang pengelolaan lingkungan hidup, tentang narkoba, dan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi”.²²

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mendalami lebih jauh permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai subjek pembakaran hutan dan lahan. Penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan dalam tulisan ini diberi judul ***“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Kebakaran Hutan Dan Lahan Berdasarkan Perspektif Perundang-Undangan”***.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana perbuatan korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara kebakaran hutan dan lahan?

²²Imam Anshori, *Korupsi Terorisme Dan Narkoba Upaya Melawan Kejahatan Luar Biasa Yang Sistematis*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 92-93.

2. Bagaimana cara menentukan kesalahan korporasi dan sanksi pidana yang dapat diterapkan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana korporasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbuatan korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara kebakaran hutan dan lahan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis cara untuk menentukan kesalahan korporasi dan sanksi pidana yang dapat diterapkan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana korporasi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan di bidang kepidanaan, khususnya dalam penelitian hukum yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara kebakaran hutan dan lahan.
2. Secara praktis penelitian ini sebagai bentuk sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara kebakaran hutan dan lahan.

E. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* ini dilandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. “Di dalam doktrin itu, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/tindak pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*)”.²³

Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. “Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya, karena suatu tindak pidana itu terdiri atas dua unsur, *a criminal act (actus reus)* dan *a criminal intent (mens rea)*”.²⁴

²³Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 93.

²⁴Hasbullah F. Sjawie, *Op. Cit.*, hlm. 10.

Actus reus atau *a criminal act* dan *mens rea* atau *quality mind* ini harus ada untuk dimintakannya pertanggungjawaban pidana. Kedua unsur itu, *actus reus* dan *mens rea*, atau disebut juga *conduct elements* tersebut, harus dipenuhi untuk menuntut adanya tanggung jawab pidana. Pertanggungjawaban pidana itu hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan suatu tindak pidana. Tidak akan ada pertanggungjawaban pidana, jika tidak didahului dengan dilakukannya suatu tindak pidana. Dengan demikian, tindak pidana itu dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, atau dipisahkan dari unsur kesalahan. “Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* ini adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability*, di mana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan”.²⁵

Pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana merupakan suatu proses dilanjutkannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan si pelaku merupakan subjek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana.²⁶

Pertanggungjawaban pidana bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri karena di samping terkait dengan suatu jenis perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, juga berhubungan dengan subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban tersebut. Dengan kata lain, “undang-undang harus terlebih dahulu menentukan siapa yang merupakan subjek yang dapat

²⁵*Ibid.*, hlm. 11.

²⁶Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, *Op. Cit.*, hlm. 47.

dipertanggungjawabkan dalam suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan memiliki dasar-dasar yang patut untuk dipidana".²⁷

Pembahasan mengenai pidana terhadap korporasi sesungguhnya harus tetap terpusat pada masalah syarat-syarat pidana, yang pada umumnya meliputi persyaratan yang menyangkut segi perbuatan dan segi pembuat yang dalam hal ini bisa orang atau pengurus korporasi atau korporasi itu sendiri sebagai pembuat delik yang harus diatur dan ditentukan dalam suatu perundang-undangan. Pengaturan pidana dan pidana dalam ketentuan perundang-undangan merupakan penerapan dari asas legalitas yang dianut dalam sistem hukum pidana Indonesia, yang bertujuan untuk memastikan bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan adalah benar-benar suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dipidana.

Walaupun pengaturan tentang pidana dan pidana terhadap korporasi telah diatur di berbagai peraturan perundang-undangan, namun penyusunan tentang perumusannya tidak terlepas dari teori dan pandangan tentang tujuan dipidananya korporasi dan jenis-jenis sanksi apa saja yang dapat diancamkan atau dijatuhkan, serta bagaimana model pengaturannya.

Seperti yang dikutip oleh Rufinus Hotmaulauna Hutauruk dalam bukunya, dalam kaitan dengan hal tersebut Friedmann mengatakan bahwa: *The main effect and usefulness of criminal conviction impose upon a corporation cannot be seen either in any personal injury or in most cases in the financial detriment, but in the public opprobrium and stigma that attaches to a conviction* (Pengaruh utama dan kegunaan dari pendakwaan tindak pidana yang dikenakan terhadap sebuah korporasi tidak dapat dilihat baik dalam

²⁷*Ibid.*, hlm. 48.

setiap kerugian personal apapun atau dalam banyak kasus dalam kerugian di bidang finansial, tetapi atas penghinaan publik dan stigma yang melekat pada dakwaan itu).²⁸

2. Korporasi

Secara harfiah korporasi (*corporate*, Belanda), *corporation* (Inggris), *ccorporation* (Jerman) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “*tio*”, “*corporatio*” sebagai kata benda (*substantivum*) berasal dari kata kerja “*corporare*” yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. “*corporare*” sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia=badan) yang berarti memberikan badan atau membadankan. “Dengan demikian, “*corporatio*” itu berasal dari hasil pekerjaan membadankan. Badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam”.²⁹

Muladi dan Dwidja Priyatno menyatakan berasal dari kata *corporate*, yaitu “suatu badan yang mempunyai sekumpulan anggota dan anggota-anggota tersebut mempunyai hak dan kewajiban sendiri, yang terpisah dari hak dan kewajiban tiap-tiap anggota”.³⁰ Korporasi merupakan sebutan yang lazim digunakan di kalangan ahli hukum pidana untuk mehyebut apa yang biasa dalam hukum lain khususnya dalam bidang hukum perdata, sebagai badan hukum atau yang dalam bahasa

²⁸*Ibid.*, hlm. 91-92.

²⁹Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 1.

³⁰*Ibid.*, hlm. 2.

Belanda disebut *rechts persoon*, dan dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.

Secara istilah, “korporasi diartikan sebagai suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri atau suatu personifikasi”.³¹ Korporasi adalah badan hukum yang beranggota serta memiliki hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.

Satjipto Rahardjo mendefenisikan korporasi sebagai suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan hukum yang diciptakannya itu terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur “*animus*” yang membuat badan hukum itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, kecuali penciptaannya kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.

Menurut pendapat Yan Pramadya Puspa dalam Disertasi Sahuri L menyatakan bahwa:

Korporasi atau badan hukum adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan di sini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (*persona*) ialah sebagai pengemban (pemilik) hak dan kewajiban-kewajiban; memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.³²

³¹*Ibid.*

³²Sahuri L, “**Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia**”, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2013, hlm. 20.

Selanjutnya Sahuri L dalam Disertasinya juga mengutip pendapat A. Abdurachman tentang korporasi dalam Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, dan Perdagangan yaitu:

Korporasi adalah suatu kesatuan menurut atau suatu badan susila yang diciptakan menurut undang-undang sesuatu negara untuk menjalankan suatu usaha atau aktivitas atau kegiatan lainnya yang sah. Badan ini dapat dibentuk untuk selama-lamanya atau untuk sesuatu jangka waktu terbatas, mempunyai nama dan identitas yang dengan nama dan identitas itu dapat dituntut di muka pengadilan, dan berhak akan mengadakan suatu persetujuan menurut kontrak dan melaksanakan semua fungsi lainnya yang seseorang dapat melaksanakannya menurut undang-undang suatu negara. Pada umumnya suatu corporation dapat merupakan suatu organisasi pemerintah, setengah pemerintah, atau partikelir.³³

3. Kebakaran Hutan dan Lahan

“Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan, lahan, hasil hutan dan/atau hasil lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan/atau nilai lingkungan”.³⁴

Bambang Purbowaseso dalam bukunya membedakan antara Kebakaran hutan dengan kebakaran lahan, dimana perbedaannya terletak pada lokasi kejadiannya. Kebakaran hutan terjadi di kawasan hutan, sedangkan kebakaran lahan berada di luar kawasan hutan. Contoh kebakaran hutan yaitu kebakaran pada areal hutan HPH (Hak Penguasaan Hutan), HPHTI (Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri), Hutan Lindung, Hutan Suaka Margasatwa, Taman Nasional. Contoh kebakaran lahan yaitu kebakaran di areal PIR (Perkebunan Inti Rakyat), ladang, kebun, transmigrasi, padang penggembalaan sapi, areal tambang. Dengan demikian, “suatu kejadian kebakaran hutan bisa saja berupa kebakaran hutan dan

³³*Ibid.*, hlm. 21.

³⁴Grand Design, **Pencegahan Kebakaran Hutan, Kebun, Dan Lahan 2017-2019**, hlm. VII.

lahan. Hal ini terjadi apabila areal hutan berdekatan dengan areal kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan”.³⁵

F. Landasan Teori

Diakui bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi pada awalnya menghadapi kendala hukum, khususnya yang menyangkan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). “Dengan berjalannya waktu, maka pada perkembangannya kemudian hukum pidana berhasil menemukan dan mengembangkan teori yang berkaitan dengan cara mempertanggungjawabkan pidana korporasi tanpa meninggalkan asas tiada pidana tanpa kesalahan.”³⁶

Dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, maka “tujuan dari pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi itu antara lain adalah sebagai alat untuk pencegahan efektif terhadap kejahatan mendatang, rehabilitasi, baik terhadap korporasi maupun akibat tindak pidana; dan pesan simbolik bahwa tidak ada kejahatan yang bebas dari pemidanaan, sekaligus juga untuk keadilan”.³⁷

Beberapa teori utama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, yang pada awalnya berkembang di negara-negara *common law*, yang kemudian telah menjadi teori yang banyak diikuti oleh negara-negara lainnya dan bisa dikatakan telah menjadi universal.

1. Teori Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*)

³⁵Bambang Purbowaseso, *Op. Cit.*, hlm. 7.

³⁶Hasbullah F. Sjawie, *Op. Cit.*, hlm. 23.

³⁷*Ibid.*, hlm. 24.

Strict liability diartikan sebagai suatu tindak pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*. *Strict liability* ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Dengan substansi yang sama, konsep *strict liability* dirumuskan sebagai *the nature of strict liability offences is that they are crimes whict do not require any mens rea with regard to at least one element of their "actus reus"* "(konsep pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu bentuk pelanggaran/kejahatan yang di dalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan)".³⁸

Pendapat lain mengenai *strict liability* dikemukakan oleh Roeslan Saleh sebagai berikut:

Dalam praktik pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap, jika ada salah satu keadaan yang memaafkan. Praktik pula melahirkan aneka macam tingkatan keadaan-keadaan mental yang dapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan untuk penanganan pidananya cukup dengan *strict liability*.³⁹

Dalam tindak pidana yang bersifat *strict liability* yang dibutuhkan hanyalah dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), dan hal itu sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana daripadanya. "Jadi, tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan)

³⁸Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 112.

³⁹*Ibid.*, hlm. 113.

sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan), bukan *mens rea* (kesalahan)”⁴⁰

Dalam sistem hukum di Indonesia pertanggung jawab mutlak diatur di dalam perundang-undangan di antaranya Undang-Undang Lingkungan Hidup (UU No. 23 Tahun 1997) Pasal 35 yang berbunyi:

Penanggung jawab usaha kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.⁴¹

Di negara *common law*, penerapan teori pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* atau *liability without fault* ini adalah delik dalam undang-undang (*statutory offences* atau *regulatory offences*), yang pada umumnya merupakan tindak pidana terhadap kesejahteraan umum, keamanan/kesehatan makanan, termasuk *consumer protection*, di samping tindak pidana yang menyangkut ketertiban umum, fitnah atau pencemaran nama baik, dan *contempt of court* serta pelanggaran lalu lintas. “*Strict liability* dimaksudkan untuk menanggulangi tindak pidana kesejahteraan masyarakat (*public welfare offences*), bersifat tindak pidana ringan, yang diancam dengan pidana denda”⁴².

L. B. Curzon mengemukakan tiga alasan mengapa di dalam *strict liability* aspek kesalahan tidak perlu dibuktikan. *Pertama*, adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan

⁴⁰*Ibid.*,

⁴¹Moh. Hatta, *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, Liberty, Yogyakarta, 2016, hlm. 53.

⁴²Hasbullah F. Sjawie, *Op. Cit.*, hlm. 24.

untuk kesejahteraan masyarakat. *Kedua*, pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sulit untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. *Ketiga*, tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.⁴³

Penerapan teori *strict liability* sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas. Adapun yang menjadi landasan penerapan *strict liability* terdapat beberapa patokan, antara lain:

- a. Tidak berlaku umum terhadap semua jenis tindak pidana tetapi sangat terbatas dan tertentu, terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial.
- b. Perbuatan itu benar-benar bersifat melawan hukum yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dan kepatutan.
- c. Perbuatan itu dilarang dengan keras oleh undang-undang karena dikategorikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang sangat potensial mengandung bahaya kepada kesehatan, keselamatan dan moral publik.
- d. Perbuatan atau aktivitas tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang sangat wajar.⁴⁴

Dalam kaitannya dengan *intentional tort*, semua orang punya kewajiban untuk menghindari perbuatan melanggar hukum dengan sengaja. Sehubungan dengan kelalaian, semua orang punya kewajiban berhati-hati secara patut. Pada dua sisi tersebut di mana hukum menyatakan, kewajiban adalah mutlak untuk menghindari perbuatan melanggar hukum, tanpa mempersoalkan bersalah atau tidak bersalah pelaku perbuatan wajib bertanggung jawab mengganti kerugian akibat perbuatannya itu.

Bilamana orang melakukan perbuatan yang sangat berbahaya (*extremely hazardous*) dan hal itu dapat diduga akan menimbulkan kerugian, jika kerugian itu

⁴³Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 113.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 116.

benar-benar terjadi, orang itu akan dibebani tanggung jawab mutlak. “Tanggung jawab mutlak artinya tanpa mempersoalkan bersalah atau tidak bersalah wajib membayar ganti kerugian akibat perbuatannya itu”.⁴⁵

2. Teori Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*)

Teori Pertanggungjawaban pengganti atau *vicarious liability* ini pada dasarnya adalah untuk menjawab pertanyaan, apakah terhadap seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. “Dengan perkataan lain, apakah perbuatan dan kesalahan seseorang itu bisa dimintakan pertanggungjawaban kepada orang lain. Pertanyaan ini muncul karena pada dasarnya pertanggungjawaban pidana itu merupakan hal pribadi”.⁴⁶

Ajaran ini berpangkal tolak pada teori keagenan yang berkembang dalam lingkup hukum perdata dalam kaitannya dengan *tort law*, yang kemudian secara gradual diadopsi serta diimplementasi ke dalam bidang hukum pidana. Menurut teori keagenan ini, korporasi bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahan karyawannya.

Secara umum tidak dimungkinkan adanya permintaan pertanggungjawaban secara pidana kepada seseorang atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, karena pertanggungjawaban pidana itu sifatnya pribadi atau *personal*, dan seseorang itu dipidana akibat dari kesalahannya sendiri, dan bukan akibat dari kesalahan orang lain.

⁴⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 549.

⁴⁶Hasbullah F. Sjawie, *Op.Cit.*, hlm. 28.

Ajaran pertanggungjawaban pengganti ini memberikan pengecualian atas prinsip pertanggungjawaban suatu perbuatan, yang padanya harus melekat unsur kesalahan. Pertanggungjawaban pidana yang umumnya hanya dapat terjadi jika pada diri pembuatnya ada unsur kesalahan, maka dengan ajaran *vicarious liability* diberikan pengecualian, di mana seseorang itu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Contohnya adalah seorang majikan dinyatakan bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan pegawainya. Bahkan ajaran ini telah berkembang lebih jauh, sehingga meskipun pengusaha itu tidak mengetahui atau tidak memberikan kewenangan, atau tidak berpartisipasi dalam tindak pidana yang dilakukan bawahannya, tetap saja seorang majikan bisa dinyatakan bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup kewenangannya. Ajaran ini juga timbul karena hubungannya delegasi, misalnya antara seorang pemegang izin usaha dengan orang yang menyelenggarakan usahanya. Jadi, pendeknya, pertanggungjawaban dalam *vicarious liability* pada hakikatnya bukan ditujukan atas kesalahan orang lain, tetapi terhadap ‘hubungannya’ dengan orang itu.⁴⁷

Doktrin *vicarious liability* ini, yang sering disebut juga sebagai *respondeat superior*, atau juga dinamakan sebagai *theory of imputing*, karena perbuatan seorang pegawai yang bertindak untuk kepentingan korporasinya dimasukkan atau diteruskan ke dalam korporasinya, maka seperti yang telah disampaikan di atas, sebenarnya merupakan hasil dari pengadopsian dari prinsip yang ada pada hukum perdata, yaitu perbuatan melawan hukum, suatu konsep hukum yang timbul sejak abad ke-17, di mana dikenal prinsip bahwa majikan akan bertanggung jawab atas kerugian pihak ketiga akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya, sepanjang karyawan itu bertindak dalam lingkup pekerjaannya.

Berkaitan dengan pengadopsian ajaran *tort* atau perbuatan melawan hukum dalam pengetahuan *corporate civil liability* ke dalam *corporate criminal liability* ini,

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 30.

maka terdapat dua karakteristik penting yang sama di antara keduanya, yaitu *pertama*, bahwa keduanya memintakan pertanggungjawaban korporasi, dan *kedua*, tujuannya adalah untuk menentukan adanya kesalahan korporasi. Meski demikian, terdapat empat karakteristik yang berbeda di antara keduanya, yaitu *pertama*, pertanggungjawaban pidana korporasi mempunyai proteksi prosedur yang lebih kuat, *kedua*, mempunyai perangkat penegakan hukum yang lebih kuat, *ketiga*, mempunyai hukuman yang lebih berat, antara lain karena stigma yang ditimbulkannya, dan *keempat*, mempunyai peran yang lebih besar sebagai pemberi pesan bagi pihak lainnya. “Keempat karakteristik yang ada pertanggungjawaban pidana korporasi ini belum tentu bisa ditemukan pada suatu pertanggungjawaban perdata bagi korporasi”.⁴⁸

Teori tanggung jawab pengganti atau *vicarious liability* dalam hukum pidana juga berkembang dengan pola yang sama seperti yang terjadi dalam lapangan hukum perdata dengan doktrin *respondeat superior*, di mana pada awalnya korporasi tidak bisa dimintakan tanggung jawab pidananya atas perbuatan orang yang berada di dalamnya, sepanjang tindakan itu tidak dianjurkan atau diperintahkannya. Dengan demikian, semula *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti ini diterapkan hanya pada kasus-kasus di mana seorang bawahan melakukan suatu delik, yang terjadi dalam lingkup pekerjaannya, dengan sepengetahuan majikannya yang dilakukannya untuk kepentingan korporasinya.⁴⁹

Kemudian doktrin ini berkembang, sehingga tanpa kesalahan atau sepengetahuan majikan, maka majikan atau atasan itu bisa dibebani tanggung jawab pidana sebagai akibat perbuatan bawahannya, berdasarkan prinsip pendelegasian. Dalam perkembangan hukum modern, doktrin ini ditujukan atas

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 31.

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 33.

dasar bahwa korporasi harus membayar kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya, sehingga korporasi diharapkan lebih selektif untuk mengangkat pengurus atau pegawainya yang bisa bertindak dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

Pada perkara lainnya tersebut, prinsip tanggung jawab pengganti tersebut kembali ditekankan, bahwa suatu *company* bisa dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan pegawainya, meskipun *company* telah mengingatkan pegawainya untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu yang bisa menjadi suatu tindak pidana.

Kritik utama yang ditujukan bagi prinsip pertanggungjawaban pengganti adalah bahwa sangat tidak adil untuk menghukum seseorang (majikan) sebagai akibat perbuatan orang lain (karyawannya), apalagi jika orang yang dihukum itu sudah melakukan berbagai langkah yang diperlukan sedemikian rupa sehingga diharapkan tidak ada orang lain (karyawan) yang berada di bawah kedudukannya (sebagai majikan) melakukan suatu tindak pidana. “Karenanya meskipun ajaran *vicarious liability* atau *respondeat superior* ini ditemukan penerapannya di Amerika Serikat, akan tetapi di berbagai negara lain penerapan teori ini hanya dilaksanakan terhadap tindak pidana yang tidak mensyaratkan *mens rea*”,⁵⁰ seperti misalnya yang berkaitan dengan polusi, kesehatan dan keamanan makanan dan obat, dan kesehatan dan keamanan pada tempat kerja.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 36.

Penerapan ajaran pertanggungjawaban pengganti ini masih menimbulkan perdebatan. Akan tetapi, meskipun demikian penerapan ajaran ini masih bisa diterima oleh sebagian kalangan, sepanjang dalam kaitannya dengan perbuatan dan *mind* karyawan itu korporasinya tidak mengambil suatu tindakan yang sewajarnya untuk mencegah atau mengurangi terjadinya suatu tindak pidana. “Sepanjang ada kelalaian dari korporasi untuk melakukan tindakan yang wajar itu, maka sepanjang itu pula bisa dikatakan korporasi yang bersangkutan wajib bertanggung jawab”.⁵¹

3. Teori Kesalahan

Dalam hukum pidana dikenal asas yang paling fundamental, yakni asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan yang dikenal dengan “*keine strafe ohne schuld*” atau “*geen straf zonder schuld*” atau “*nulla poena sine culpa*”. Dari asas tersebut dapat dipahami bahwa kesalahan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana. Artinya, seseorang yang diakui sebagai subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana. Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan, lazim disebut sebagai kemampuan bertanggungjawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan serta alasan pemaaf. Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan, dalam subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain: “1) Adanya kemampuan bertanggung

⁵¹*Ibid.*, hlm. 38.

jawab pada si pelaku, 2) Perbuatannya tersebut berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), 3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf⁵². Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, dimana unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain.

Dalam hukum, dikenal berbagai dasar atau prinsip dari tanggung jawab hukum, yaitu:

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya unsur kesalahan (*fault liability, liability based on fault principle*). Prinsip ini membebankan pada korban untuk membuktikan bahwa pelaku itu telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan dirinya.
- b. Prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya praduga (*rebuttable presumption of liability principle*). Prinsip ini menegaskan bahwa tanggung jawab si pelaku bisa hilang jika dapat membuktikan tidak bersalah kepada korbannya.
- c. Prinsip tanggung jawab mutlak (*no-fault liability, absolute* atau *strict liability principle*), yaitu tanggung jawab tanpa harus membuktikan kesalahannya.⁵³

Prinsip yang pertama, *fault liability*, atau *liability based on fault principle*, adalah prinsip yang dikenal secara mendunia, meski ada beberapa delik yang pertanggungjawabannya berpangkal pada kedua prinsip lainnya, yaitu *rebuttable presumption of liability principle*, seperti misalnya untuk pembebanan pembuktian terbalik pada perkara tindak pidana tertentu, dan untuk prinsip yang ketiga, *strict liability*, misalnya dalam hal tindak pidana yang menyangkut pencemaran lingkungan hidup, akan tetapi secara umum prinsip yang pertama, yaitu

⁵²<http://www.gresnews.com/mobile/berita/tips/81864-pengertian-kesalahan-menurut-hukum-pidana/>, diakses pada tanggal 12 Mei 2020.

⁵³Hasbullah F. Sjawie, *Op. Cit.*, hlm. 8.

pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang bersifat universal pada pembebanan pertanggungjawaban dalam hukum.

Dalam kaitannya dengan pembebanan pertanggungjawaban dalam hukum, terdapat beberapa pandangan yang dikemukakan oleh para ahli.

Menurut Zainal Abidin dalam bukunya Hasbullah F. Sjawie, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik meliputi: kemampuan bertanggung jawab, kesalahan dalam arti luas, yaitu sengaja dan/atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf (*verontcshuldigingsgronden*).

Simons berpandangan bahwa untuk mengatakan adanya kesalahan pada untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku, maka harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut si pelaku itu sendiri, yaitu kemampuan bertanggung jawab, hubungan kejiwaan antara pelaku, kelakukannya dan akibat yang ditimbulkan, dan *dolus* atau *culpa* (kesengajaan atau kealpaan).

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana ini, pendapat senada dikemukakan oleh Andi Hamzah juga, di mana dia berpendapat bahwa kesalahan (dalam arti luas) itu meliputi tiga hal, yaitu pertama, sengaja, kedua, kelalaian, dan ketiga, dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, Soema di Pradja mengemukakan pendiriannya, di mana dikatakannya bahwa bagian-bagian dari KUHP telah mengajukan beberapa hal sebagai syarat untuk dipidananya seorang pelaku tindak pidana, yaitu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, atau pelaku itu mampu bertanggung jawab,

perbuatan itu dapat disesalkan pada pelakunya, dan perbuatan yang telah dilakukan itu bersifat melawan hukum.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dengan demikian “seseorang baru dapat dipidana jika dipenuhi syarat pemidanaan yang objektif atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan syarat pemidanaan yang subjektif atau pertanggungjawaban pidana (*mens rea*), atau disebut juga kesalahan”.⁵⁴

“Dalam hal penyidikan, penuntutan dan pembuktian tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi akan sangat terbantu apabila pengadilan menerapkan sistem pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) di dalam proses persidangan”.⁵⁵ Oleh karena itu, perlu diterapkannya asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) bukan hanya dalam proses penegakan hukum secara keperdataan tetapi juga perlu diterapkan dalam proses peradilan pidana.

Diterimanya *strict liability* sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan diadopsi dari konsep kesalahan normatif. Teori kesalahan normatif menyebabkan kesalahan tidak mutlak harus dilihat sebagai kondisi kejiwaan manusia yang ditandai dengan kesengajaan atau kealpaan. “Dengan demikian, memungkinkan kesalahan terdapat bukan hanya pada subjek hukum manusia tetapi juga pada korporasi karena akan sangat sulit untuk

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 10.

⁵⁵Ridho Kurniawan, “**Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas *Strict Liability* (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup)**”, Jurnal Yuridis Vol.1 No.2, Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta, 2014, hlm. 162.

menentukan adanya kesalahan pada korporasi jika kesalahan semata-mata dilihat sebagai masalah psikologis”.⁵⁶

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

“Menurut Peter Mahmud Marzuki, yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.⁵⁷

Menurut Bahder Johan Nasution, yang dimaksud dengan penelitian merupakan:

Pencerminan secara konkret kegiatan ilmu dalam memproses ilmu pengetahuan. Sehingga pentingnya melakukan penelitian ini untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dilihat dari dua segi, pertama dilihat dari proses penelitian itu sendiri, yaitu manusia memerlukan jawaban untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan yang dihadapi. Kedua dapat dilihat dari hasil penelitian itu sendiri, yaitu hasil bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.⁵⁸

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan Ke-13, Kencana, 2017, hlm. 37.

⁵⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 9-10.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, penelitian ini akan menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode penelitian hukum Bahder Johan Nasution. Pada penelitian ini akan menitikberatkan persoalannya pada suatu permasalahan aturan hukum. Permasalahan tersebut kemudian dikaji dan dianalisis dengan konsep ataupun peraturan lain untuk menemukan produk hukum yang benar secara teori keilmuan dan berlaku pada pemberlakuannya.

Hukum dapat diartikan sebagai norma tertulis yang dibuat secara resmi dan diundangkan oleh pemerintah dari suatu masyarakat. Di samping hukum tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis tetapi efektif mengatur perilaku para anggota masyarakat. Norma merupakan manifestasi dari sistem nilai yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Melalui sosialisasi yang panjang norma-norma tersebut diinternalisasikan pada seluruh anggota masyarakat.⁵⁹

Selain mengatur perilaku norma hukum juga memberi kuasa kepada norma hukum untuk mengatur perilaku atau berfungsi mengatur atau mengubah norma hukum lain, dimana menurut Bruggink norma hukum sebagai berikut:

- a. Perintah (*gebod*); yaitu kewajiban masyarakat untuk melakukan sesuatu.
- b. Larangan (*verbod*); yaitu kewajiban masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu.
- c. Pembebasan/Dispensasi (*vrifstelling*); yaitu pembolehan khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum harus dilakukan.
- d. Izin (*toestemming*); yaitu pembolehan (perkenan) atau pengecualian khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang.⁶⁰

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 83.

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 84.

Penelitian ilmu hukum normatif sejak lama telah digunakan oleh ilmuwan hukum untuk mengkaji masalah-masalah hukum. Penelitian ilmu hukum normatif meliputi pengkajian mengenai:

- a. Asas-asas hukum
- b. Sistematika hukum
- c. Taraf sinkronisasi hukum
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah hukum⁶¹

Penelitian ilmu hukum normatif dapat diketahui bahwa hal yang paling prinsip dan mendasar dalam penelitian ilmu hukum normatif adalah “bagaimana seorang peneliti menyusun dan merumuskan masalah penelitiannya secara tepat dan tajam, serta bagaimana seorang peneliti memilih metoda untuk menentukan langkah-langkahnya dan bagaimana ia melakukan perumusan dalam membangun teorinya”.⁶²

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁶³

Sehubungan dengan tipe penelitian yang akan digunakan yakni yuridis normatif, maka pendekatan yang akan dilakukan adalah Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

⁶¹*Ibid.*, hlm. 86.

⁶²*Ibid.*, hlm. 88.

⁶³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan Keenam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 133.

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (*card system*). Dalam penulisan ini penelitiannya dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Adapun bahan-bahan hukum hukum itu meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara kebakaran hutan dan lahan berupa: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan..
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil penelitian yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara kebakaran hutan dan lahan dan pendapat dari para pakar hukum baik berbentuk buku, makalah, jurnal, internet, dan lain-lain.

- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka dilakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum guna menemukan makna yang terkandung di dalamnya, dengan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara kebakaran hutan dan lahan serta mengevaluasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kegiatan yang akan dilakukan dalam analisis bahan hukum yaitu:

- a. Menginventarisasi yakni memilih pasal-pasal yang berisi tentang kaidah-kaidah hukum yang mengatur masalah mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara kebakaran hutan dan lahan.
- b. Mensistematisasi yakni membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu.
- c. Menginterpretasi yakni bahan hukum yang berupa bahan primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan, diseleksi, diklasifikasi dan dianalisis secara induktif kualitatif yaitu suatu cara penyimpulan hal-hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus, ditarik kesimpulan yang hasil-hasilnya akan dirumuskan dalam bentuk pernyataan tanpa menggunakan angka statistik.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan suatu gambaran mengenai isi pembahasan dalam penulisan tesis ini, maka disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab. I Pendahuluan, yang terdiri atas, Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- Bab. II Merupakan tinjauan umum tentang Pertanggungjawaban Pidana, Kejahatan Korporasi, Pengaturan Sanksi Pidana Tentang Kejahatan Korporasi, serta Kebakaran Hutan dan Lahan dalam Perspektif Perundang-Undangan.
- Bab. III Merupakan Pembahasan tentang Perbuatan Korporasi Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Pidana Dalam Perkara Kebakaran Hutan Dan Lahan berdasarkan Perspektif Perundang-Undangan.
- Bab. VI Merupakan bab yang menguraikan mengenai Penentuan Kesalahan Korporasi dan Sanksi Pidana Yang Diterapkan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.
- Bab. V Penutup, menguraikan kesimpulan dari penelitian terhadap permasalahan yang di teliti serta menguraikan saran-saran yang harus dilakukan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kebakaran hutan dan lahan berdasarkan Perspektif Perundang-Undangan.